

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara berkembang dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. Dimana setiap tahunnya jumlah penduduk berkembang lebih cepat daripada jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia. Hal ini menyebabkan tingginya tingkat pengangguran, yang dapat memicu masalah sosial seperti kriminalitas dan dampak negatif terhadap ekonomi. Keadaan ini dapat memperkecil tingkat kesejahteraan dan kemampuan masyarakat. Semakin kecil jumlah pengangguran maka semakin sejahtera kehidupan suatu negara, begitu sebaliknya.

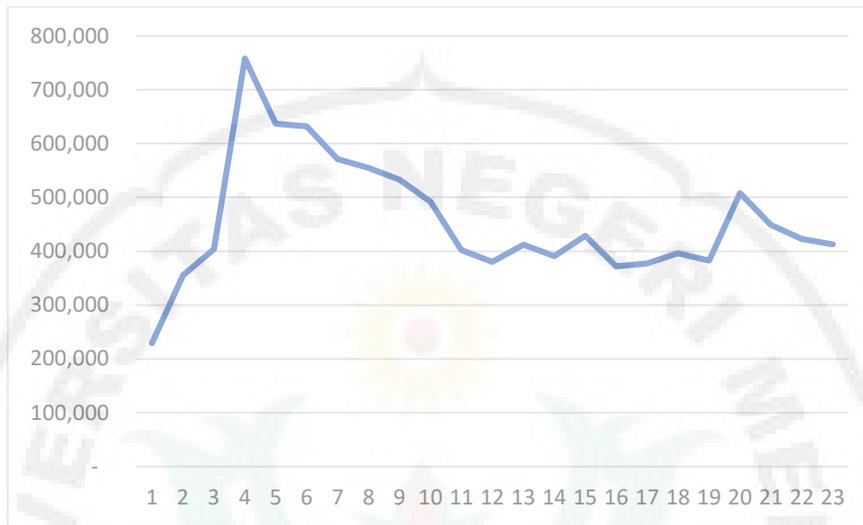
Persoalan pengangguran yaitu masalah yang selalu di hadapi oleh setiap negara, baik negara yang sudah maju ataupun negara yang masih berkembang. Di negara yang sudah maju, timbulnya pengangguran lebih terikat dengan naik turunnya aktivitas ekonomi dan bisnis. Tetapi di negara berkembang (termasuk Indonesia) persoalan pengangguran timbul karena tidak adanya atau kurangnya lapangan pekerjaan, meningkatnya angkatan kerja, kurangnya penanaman modal dan juga persoalan sosial politik di dalam negeri (Limongan, 2001).

Menurut (Sukirno, 2012) Pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Pengangguran seringkali menjadi penghambat dalam hal perekonomian, karena dengan adanya pengangguran sumber daya yang dimiliki akan

terbuang dengan sia-sia sehingga akan menghambat produktifitas dan juga pendapatan. Dengan berkurangnya pendapatan maka akan menyebabkan kemiskinan dan juga masalah-masalah sosial lainnya.

Pengangguran menjadi masalah bagi semua negara di dunia. Tingkat pengangguran yang terlalu tinggi dapat mengganggu stabilitas nasional setiap negara. Sehingga setiap negara berusaha untuk mempertahankan tingkat pengangguran pada tingkat yang wajar. Dalam ekonomi makro, masalah pengangguran dibahas pada pasar tenaga kerja (*labour market*) yang juga dihubungkan dengan keseimbangan tingkat upah dan tenaga kerja (Ningsih, 2011).

Provinsi Sumatera Utara menjadi salah satu wilayah yang memiliki jumlah penduduk yang tinggi. Laju pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi, menjadi tugas utama pemerintah untuk menyeimbangkan dengan penciptaan sumber-sumber ekonomi yang dapat menyerap tenaga kerja yang lebih besar. Meskipun memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, provinsi ini menghadapi tantangan besar dalam menciptakan lapangan kerja yang cukup untuk menampung angkatan kerja yang terus meningkat. Data tingkat pengangguran yang didapat pada provinsi Sumatera Utara masih mengalami fluktuasi beberapa tahun belakang ini.



Gambar 1. 1 Pengangguran di Provinsi Sumatera Utara

Sumber : BPS SUMUT (diolah,2024)

Pada Gambar 1.1 dapat dilihat bahwa tingkat pengangguran di Provinsi Sumatera Utara mengalami penurunan dan kenaikan di setiap tahunnya walaupun nilai yang berkurang atau bertambah tidak cukup drastis tetapi hal tersebut tentu saja akan berpengaruh pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Jika dilihat dari tahun 2001-2023 tingkat pengangguran tertinggi terdapat pada tahun 2004 hal tersebut dikarenakan adanya pertumbuhan penduduk yang cukup pesat, keterbatasan tersedianya lapangan kerja, kualitas pendidikan yang rendah dan upah yang tidak memadai. Selanjutnya di tahun berikutnya tingkat pengangguran mulai menurun sampai di tahun 2020 tingkat pengangguran kembali meningkat yang diakibatkan oleh adanya pandemic COVID-19 yang mengakibatkan perusahaan tidak membutuhkan karyawan tetapi malah mengurangi karyawannya.

Pengangguran merupakan bagian dari angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan tetapi aktif mencari pekerjaan. Dilihat dari data, angka tertinggi pada angkatan kerja terjadi pada tahun 2022 sebesar 7,669,870 jiwa. Dimana setelah dampak pandemi COVID-19 banyak sektor ekonomi mulai pulih, yang mendorong lebih banyak orang untuk kembali mencari pekerjaan (Lingga, 2024). Meningkatnya kualitas pendidikan dan pelatihan keterampilan di masyarakat juga berperan dalam meningkatkan angkatan kerja. Dengan lebih banyak individu yang memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar, mereka lebih siap untuk memasuki dunia kerja, dan dapat mengurangi angka pengangguran (Safrina, 2023).

Dalam teori kurva Phillips menjelaskan bahwa memiliki hubungan negatif antara inflasi dan pengangguran. Ketika inflasi meningkat pengangguran cenderung menurun karena perusahaan meningkatkan produksi untuk memenuhi permintaan yang lebih tinggi, yang memerlukan lebih banyak tenaga kerja. IPM mencerminkan kualitas hidup masyarakat. Ketika IPM rendah, berhubungan dengan tingkat pengangguran yang tinggi karena kurangnya akses terhadap pendidikan yang ada. Begitupun sebaliknya, peningkatan IPM dapat berkontribusi pada penurunan pengangguran karena individu lebih terampil dan siap untuk memasuki pasar kerja (Asya'ari, 2022). Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi yang kuat biasanya menciptakan lebih banyak lapangan kerja, sehingga mengurangi tingkat pengangguran. Ketika ekonomi tumbuh, permintaan terhadap barang dan jasa meningkat, mendorong perusahaan untuk merekrut lebih banyak karyawan (Suriati). Secara keseluruhan, hubungan antara

pengangguran, inflasi, indeks pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi yang efektif harus mempertimbangkan semua variabel. Mengelola inflasi dengan bijaksana serta meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan dapat membantu menurunkan tingkat pengangguran sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Pengangguran dapat menjadi penghambat dalam hal perekonomian, karena dengan adanya pengangguran sumber daya yang dimiliki akan terbuang dengan sia-sia sehingga akan menghambat produktifitas dan juga turunnya daya beli masyarakat. Kemampuan daya beli masyarakat yang turun jelas mengurangi jumlah barang ataupun jasa yang diproduksi oleh sebuah perusahaan. Dengan kondisi seperti ini, seharusnya sebuah perusahaan harus membatasi jumlah permintaan tenaga kerja yang mengakibatkan pada menurunnya peluang kerja sehingga pengangguran akan kembali naik.

Permasalahan dalam pengangguran yang pertama adalah inflasi. Menurut Sukirno (2004) bahwa dengan semakin tingginya tingkat inflasi yang terjadi maka akan berakibat pada kenaikan bunga. Inflasi terjadi ketika banyak harga naik secara serentak. Kondisi perekonomian dengan tingkat inflasi yang tinggi dapat menyebabkan perubahan-perubahan dalam output dan kesempatan kerja.

Menurut Mankiw (2006) menyatakan bahwa definisi singkat dari inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk naik secara umum dan terus menerus. Kenaikan

harga dari satu atau dua barang saja tidak disebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas kepada sebagian besar dari harga barang-barang lain.

Berdasarkan Kurva Phillips, tingkat inflasi yang tinggi berdampak pada pengangguran. Bila tingkat inflasi tinggi, dapat menyebabkan angka pengangguran tinggi. Ketika inflasi meningkat, perusahaan mungkin menghadapi biaya produksi yang lebih tinggi, yang dapat memaksa mereka untuk mengurangi jumlah karyawan untuk menekan biaya. Akibatnya, ini dapat menyebabkan peningkatan pengangguran. Inflasi yang sangat tinggi, bahkan dapat menyebabkan hiperinflasi, yang secara drastis meningkatkan angka pengangguran karena perusahaan tidak mampu beroperasi secara efisien. Untuk menjaga tingkat inflasi agar tidak tinggi maka jumlah uang yang beredar di masyarakat juga harus dikendalikan.



Gambar 1. 2 Laju Inflasi di Provinsi Sumatera Utara

Sumber : BPS Sumatera Utara

Pada Gambar 1.2 diatas tingkat Inflasi di Sumatera Utara mulai tahun 2001 sampai tahun 2023 mengalami fluktuasi. Inflasi terendah terdapat pada tahun 2018 yaitu sebesar 1,23% sedangkan inflasi tertinggi terdapat pada tahun 2005 yang

mencapai 22,41%. Hal ini disebabkan oleh naiknya harga BBM, tingkat inflasi yang cukup tinggi pada tahun 2005 terjadi karena adanya bulan Ramadhan yang terjadi pada awal bulan sehingga menaikkan inflasi pada bahan makanan yang menyebabkan harga bahan pokok makanan menjadi naik.

Hubungan antara inflasi dengan tingkat pengangguran didasarkan pada asumsi bahwa inflasi merupakan cerminan dari adanya kenaikan permintaan agregat. Adanya kenaikan permintaan agregat sesuai dengan teori permintaan bahwa adanya permintaan yang naik akan mengakibatkan harga juga naik. Pada saat inflasi, dalam memenuhi permintaan tersebut, produsen akan meningkatkan kapasitas produksinya, dengan cara menambah tenaga kerja. Dengan demikian, peningkatan permintaan tenaga kerja yang disebabkan oleh naiknya harga akan mengakibatkan pengangguran menjadi berkurang.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Lamatenggo,2019) berbanding terbalik dimana hasil menunjukkan bahwa Inflasi tidak berpengaruh terhadap pengangguran. Penelitian yang dilakukan (Putri,2015) menunjukkan hasil bahwa inflasi berpengaruh negatif terhadap pengangguran.

Faktor lain yang diduga mempengaruhi pengangguran adalah tingkat pendidikan (Fitri dan Junaidi, 2016). Pendidikan merupakan salah satu indikator IPM yang dicerminkan oleh Angka Harapan Lama Sekolah atau Rata-Rata Lama Sekolah, hal ini mencerminkan tingkat pengetahuan dan keterampilan masyarakat yang sangat berpengaruh dalam hal menyikapi perkembangan dan pemberdayaan manusia guna mencapai indeks pembangunan manusia yang efektif dan berguna. Dengan

membaiiknya dan meratanya pembangunan IPM maka akan membaiknya juga tingkat pengangguran, sebaliknya jika IPM menurun maka akan menunjukkan rendahnya kualitas hidup.

Pada dasarnya, peningkatan jumlah penduduk memiliki dua sisi yang berbeda. Jumlah penduduk yang besar merupakan modal dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional, tetapi di sisi lain dengan pengaturan yang tidak tepat, jumlah penduduk yang besar dapat menimbulkan permasalahan penduduk apabila tidak disertai dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas maka mereka tidak mampu menempati lapangan pekerjaan yang tersedia di wilayah tersebut. Kualitas sumber daya manusia dapat diukur melalui besarnya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM).



Gambar 1.3 Tingkat IPM di Provinsi Sumatera Utara

Sumber : BPS Sumut

Pada Gambar 1.3 diatas terlihat pada tingkat indeks pembangunan manusia di Sumut mulai tahun 2001 sampai dengan tahun 2023 cenderung mengalami fluktuasi.

Pada tahun 2004 – 2009, setiap tahunnya angka IPM terus meningkat hingga mencapai 73,80 pada tahun 2009. Pada tahun 2011 sampai 2023 kembali meningkat bahkan tidak mengalami penurunan sama sekali. Selama periode 2004 – 2009 dan 2011 - 2023, angka IPM menunjukkan peningkatan. Hal ini menggambarkan bagaimana kinerja pemerintah terus membaik dari waktu ke waktu. Pemerintah pusat dan daerah semakin peduli untuk mencari segala cara yang memungkinkan guna memudahkan masyarakat umum memperoleh layanan kesehatan dan pendidikan dasar. Upaya ini mencakup peningkatan standar, perluasan jumlah fasilitas, atau penghapusan biaya atau retribusi untuk memperoleh layanan melalui berbagai program, termasuk pendidikan luar sekolah, literasi fungsional, dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (Badan Pusat Statistik, 2009).

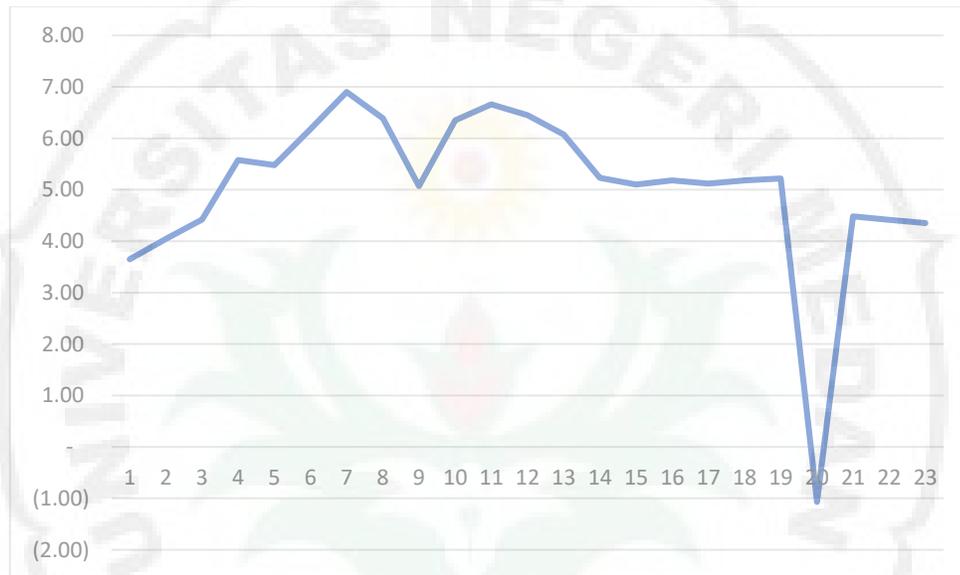
Pembangunan sumber daya manusia di Sumatera Utara telah menunjukkan kemajuan signifikan antara tahun 2010 dan 2023, dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 67,09% menjadi 73,37%. Kemajuan ini mencerminkan komitmen pemerintah provinsi dalam melaksanakan program-program pembangunan yang berfokus pada peningkatan peluang kerja, akses pendidikan, infrastruktur berkualitas, dan layanan kesehatan yang baik. Selain itu, pengembangan sektor pertanian dan pariwisata diharapkan dapat meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif bagi masyarakat. Pemerintah juga bakal mendorong pelajar untuk lebih rajin membaca melalui pojok baca dan pengembalian perpustakaan yang tersedia di 33 kabupaten/kota bahkan sampai ke desa. Pemprov Sumut juga telah

menaikkan honor guru, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para guru honor. Dan juga memberi beasiswa kepada pelajar dengan tujuan untuk peningkatan sumber daya manusia (Pemprov Sumut, 2023).

Menurut Todaro (2000), bahwa pembangunan manusia merupakan tujuan pembangunan itu sendiri. Pembangunan manusia memainkan peranan kunci dalam membentuk kemampuan sebuah negara dalam menyerap teknologi modern untuk mengembangkan kapasitasnya agar tercipta kesempatan kerja untuk mengurangi jumlah pengangguran dan pada akhirnya akan tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa dengan pembangunan manusia yang diukur melalui besarnya nilai IPM akan berdampak pada rendahnya tingkat pengangguran di suatu wilayah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Burhanudin,2015) menyimpulkan bahwa indeks pembangunan manusia memiliki pengaruh yang signifikan dan negatif terhadap tingkat pengangguran. Hal ini menjelaskan bahwa semakin tinggi angka indeks pembangunan manusia pada suatu wilayah maka akan menyebabkan tingkat pengangguran semakin menurun dan sebaliknya apabila indeks pembangunan manusia rendah akan berdampak pada tingginya tingkat pengangguran di wilayah tersebut.

Tingkat IPM yang tinggi, akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui kemampuan masyarakat untuk dapat berkontribusi lebih banyak dalam meningkatkan produktivitas dan kreativitas mereka. Ketika IPM mengalami kenaikan, maka

pertumbuhan ekonomi juga mengalami kenaikan dalam suatu kurun waktu, begitupun sebaliknya.



Gambar 1. 4 Laju Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara

Sumber : BPS Sumut

Berdasarkan Gambar 1.4, laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara antara tahun 2001 hingga 2020 menunjukkan fluktuasi yang signifikan. Pada tahun 2007, laju pertumbuhan mencapai 6,90%, angka tertinggi dalam periode tersebut, berkat peningkatan investasi dan konsumsi masyarakat. Namun, pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi menurun menjadi -1,07%, terendah selama 2001-2020, akibat resesi yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Penurunan ini berdampak pada berbagai sektor, menyebabkan peningkatan pengangguran dan penurunan daya beli masyarakat. Situasi ini menekankan pentingnya ketahanan ekonomi dan kapasitas adaptasi untuk menghadapi krisis di masa depan.

Tingginya laju pertumbuhan ekonomi tidak terlepas dari penggunaan faktor-faktor produksi yang ada di daerah. Faktor-faktor produksi tersebut meliputi sumber daya alam, tenaga kerja, dan barang-barang modal merupakan penentu pertumbuhan ekonomi. Dalam teori pertumbuhan Neo-Klasik yang dikembangkan oleh Solow, bahwa pertumbuhan ekonomi bersumber dari perkembangan faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran agregat. Faktor-faktor produksi yang menentukan pertumbuhan ekonomi adalah modal dan tenaga kerja. Untuk mencapai keseimbangan jangka panjang, modal dan tenaga kerja harus digunakan secara penuh dan dapat disubstitusikan satu sama lain (Tanjung,2019).

Menurut Sukirno (Garnella, R dkk, 2020) teori klasik Adam Smith pertumbuhan ekonomi yang pesat dan tinggi dapat mengurangi pengangguran yang ada di wilayah tersebut artinya pertumbuhan ekonomi akan berbanding lurus terhadap tingkat pengangguran. Hal itu terjadi karena saat pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah tersebut naik dengan begitu proses produksinya akan mengalami kenaikan pula. Dan hal itu akan menyerap tenaga kerja yang banyak untuk menghasilkan output produksi yang diminta. Penyerapan tenaga kerja tersebut akan dapat mengurangi pengangguran di suatu wilayah tersebut. Pembangunan ekonomi sebuah negara dapat dilihat dari beberapa indikator perekonomian. Salah satu diantaranya adalah tingkat pengangguran. Hal ini sejalan dengan data pada Provinsi Sumatera Utara, dimana pada tahun 2005-2007 tingkat pengangguran berkurang dan laju pertumbuhan ekonomi meningkat. Namun penelitian yang dilakukan oleh (Palindangan 2021) menunjukkan

bahwa hasil yang positif tetapi tidak signifikan pada pertumbuhan ekonomi terhadap jumlah pengangguran menunjukkan bahwa peningkatan produksi barang dan jasa di Kabupaten Mimika cenderung menyebabkan terjadinya pengangguran.

Untuk mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara berhasil, penting untuk memastikan bahwa pertumbuhan tersebut disertai dengan perbaikan dalam distribusi pendapatan, pengurangan jumlah penduduk miskin, dan penurunan tingkat pengangguran. Tanpa perhatian terhadap aspek-aspek sosial ini, pertumbuhan ekonomi dapat dianggap tidak berkelanjutan dan gagal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Mugabe, 2018).

1.2 Identifikasi masalah

Dari uraian latar belakang yang telah dijelaskan, ditemukan masalah sebagai berikut :

1. Pengangguran menjadi salah satu penghambat berkembangnya perekonomian
2. Tingginya tingkat inflasi mengakibatkan tingginya pengangguran dan menurunkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara
3. Tingkat pendidikan yang tinggi menjadi salah satu faktor untuk meningkatkan pembangunan manusia
4. Tingginya laju pertumbuhan ekonomi dapat menurunkan pengangguran

1.3 Pembatasan masalah

Dalam penelitian ini, batasan masalah diberikan agar penelitian lebih terfokus dan terarah, batasan tersebut antara lain :

1. Penelitian ini menggunakan variabel dependen Tingkat Pengangguran, serta variabel independen Inflasi, Indeks Pembangunan Manusia, dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara Tahun 2001- 2023
2. Data yang digunakan merupakan data dari kab/kota di Provinsi Sumatera Utara

1.4 Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh Inflasi terhadap Pengangguran di Provinsi Sumatera Utara?
2. Apakah terdapat pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Pengangguran di Provinsi Sumatera Utara?
3. Apakah terdapat pengaruh Laju Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengangguran di Provinsi Sumatera Utara?
4. Apakah terdapat pengaruh Inflasi, IPM, dan Laju Pertumbuhan Ekonomi secara simultan terhadap Pengangguran di Provinsi Sumatera Utara?

1.5 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditulis maka tujuan dari penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh Inflasi terhadap Pengangguran di Provinsi Sumatera Utara.
2. Untuk mengetahui pengaruh IPM terhadap Pengangguran di Provinsi Sumatera Utara.
3. Untuk mengetahui pengaruh Laju Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengangguran di Provinsi Sumatera Utara.
4. Untuk mengetahui pengaruh Inflasi, IPM, dan Laju Pertumbuhan Ekonomi secara simultan terhadap Pengangguran di Provinsi Sumatera Utara.

1.6 Manfaat penelitian

Penelitian ini akan memberikan manfaat antara lain :

1. Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah Indonesia dalam merumuskan kebijakan untuk mengurangi tingkat inflasi agar pengangguran di Provinsi Sumatera berkurang.

2. Peneliti

Dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam mengenai tingkat pengangguran di Provinsi Sumatera Utara.

3. Pihak lain

Menjadi bahan literature untuk kalangan akademis dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan tingkat pengangguran.